

MELEJITKAN NILAI IKK GARUT, Intip Strateginya?

SULISTIANINGSIH, JONI DAWUD, DAN YUWIN ELLA CHANDEAN

Executive Summary

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator yang mendukung pencapaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian/Lembaga/Daerah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap K/L/D harus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Penilaian IKK sendiri dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kabupaten Garut berada pada posisi ke-71 dari 226 K/L/D yang berpartisipasi dalam penilaian IKK tahun 2023. Nilai IKK yang diperoleh Kabupaten Garut adalah 68,76 (kategori baik). Apakah nilai IKK Kabupaten Garut masih dapat ditingkatkan? Tentu saja dapat ditingkatkan. Policy brief berikut ini menunjukkan penilaian mandiri terhadap kebijakan yang menjadi sample penilaian IKK pada tahun 2023. Dari hasil penilaian tersebut, dianalisis hambatan serta strategi yang perlu dilakukan untuk menangannya.

Beberapa strategi diantaranya pelaksanaan FGD yang dilakukan oleh Bappeda sebagai koordinator penilaian IKK, pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan selama proses penilaian IKK oleh narasumber yang kompeten, serta membangun komitmen bersama oleh pimpinan untuk berupaya meningkatkan nilai IKK.

A. Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper-middle income country*) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% pada triwulan I tahun 2024, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (bi.go.id, 2024). Walaupun pertumbuhan ekonomi kuat, namun masyarakat belum terlalu merasakan hasil pembangunan. Ujung tombak pembangunan yang merupakan tugas birokrasi publik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pada tahun 2023, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati ranking ke-115 dan indeks pembangunan manusia tahun 2023 yang hanya berada pada ranking ke-112. Hal tersebut menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih

jalan di tempat, dan upaya membangun modal manusia masih belum optimal. Sehingga kebutuhan reformasi birokrasi sampai detik ini masih sangat diperlukan.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan serangkaian upaya untuk memperbaiki sistem administrasi dan manajemen dalam sebuah organisasi pemerintahan atau non-pemerintahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. RB dapat melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, prosedur kerja, sistem pengawasan, penggunaan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan budaya kerja dan nilai-nilai etika dalam institusi tersebut.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Dengan RB yang berhasil, diharapkan pemerintahan dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi publiknya, serta masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari pelayanan yang lebih baik.

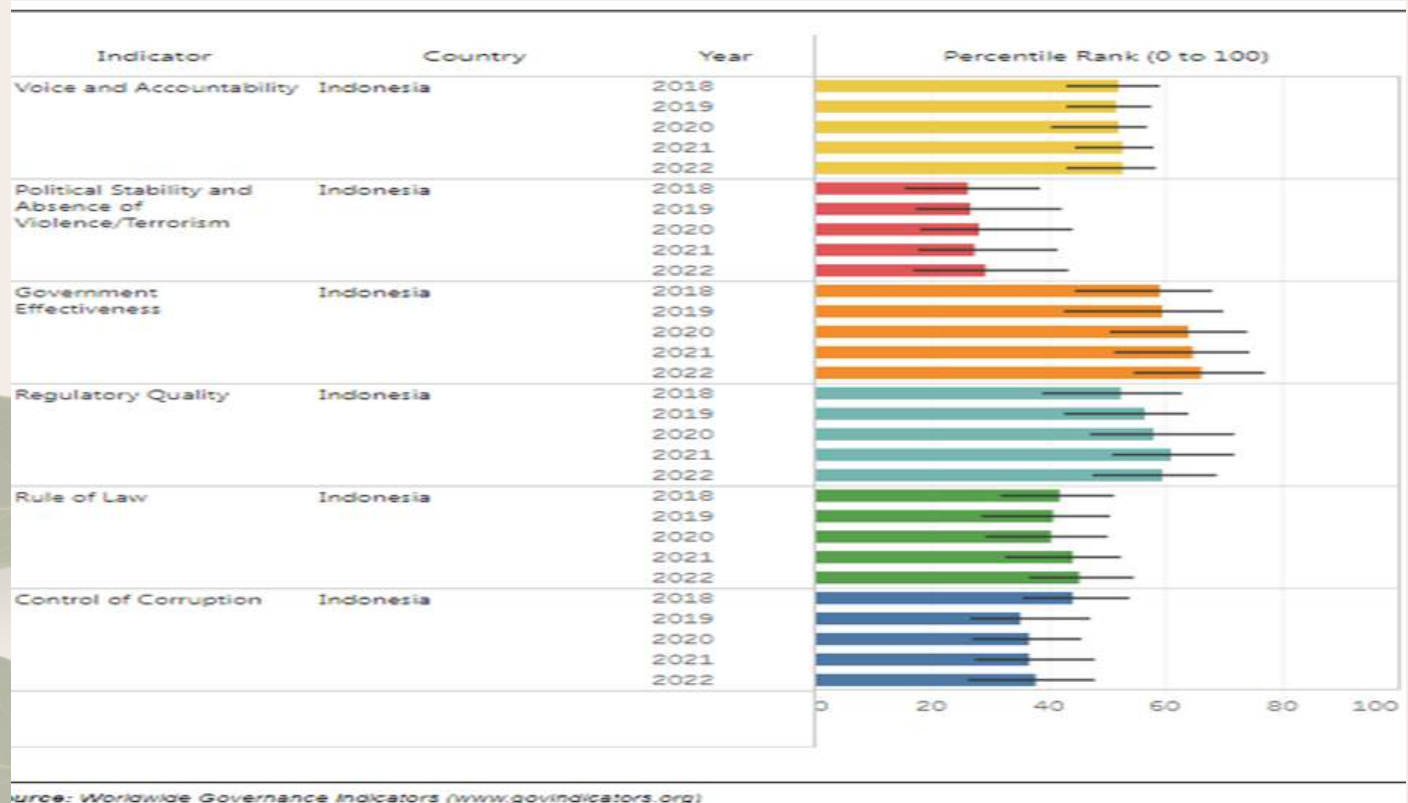
B. Deskripsi Masalah

Salah satu tantangan RB agar dapat berjalan berkesinambungan yaitu melalui peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Tentunya pemerintah pusat maupun daerah harus menjadikannya sebagai salah satu agenda penting untuk terus mendapatkan perhatian, karena fenomena kualitas kebijakan publik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan seringkali muncul ke permukaan.

Munculnya fenomena suatu kebijakan yang digulirkan pemerintah, namun hanya dalam jangka pendek diterapkan, pada akhirnya dianulir/dicabut kembali. Penyebabnya dapat berupa adanya penolakan dari publik terhadap kebijakan tersebut yang sulit untuk diterapkan, atau kebijakan tersebut berdampak negatif pada persoalan atau sektor yang lainnya. Sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam kualitas kebijakan.

World Bank (2023) telah melakukan penilaian terhadap negara-negara di dunia termasuk Indonesia dimana hasil penilaian kualitas kebijakan (*regulatory quality*) pada tahun 2022 sebesar 60% artinya masih dinilai belum baik. Walaupun dari tahun 2018 sampai dengan 2022, *regulatory quality* Indonesia tersebut menunjukkan *tren* yang positif (Gambar 1).

Gambar 1.
Wordwide Governance Indicators untuk Indonesia



Sumber: <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

Peningkatan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator RB yang dinilai melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Upaya penilaian IKK terhadap Kementerian/Lembaga/Daerah dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kebijakan. Capaian Nilai dari IKK tersebut mencerminkan kualitas kebijakan secara umum di suatu instansi baik di K/L/D.

Pemerintah Kabupaten Garut masih mempunyai nilai IKK yang belum optimal yaitu senilai 68,76 pada kategori baik. Selain itu, peringkat IKK Kabupaten Garut berada pada posisi ke-71 dari 226 K/L/D yang berpartisipasi dalam penilaian IKK tahun 2023. Untuk itu diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan secara lebih optimal.

Deskripsi permasalahan berdasarkan analisis data dan hasil wawancara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

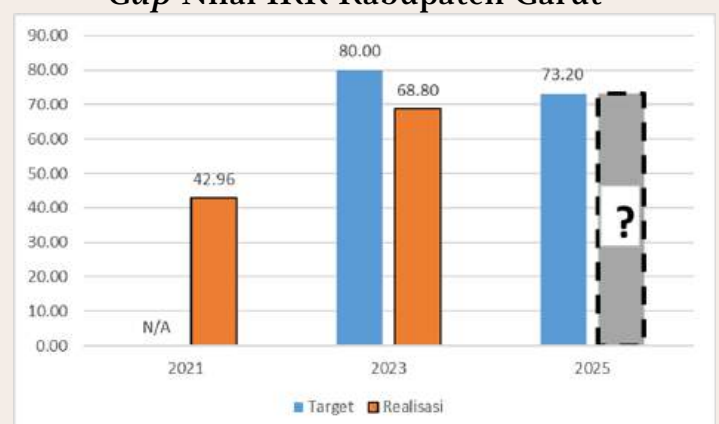
1. Penilaian IKK pada Kementerian/Lembaga/ Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah sangat memerlukan tim yang mengkoordinir selama proses penilaian IKK. Pemerintah Kabupaten Garut, diwakili oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang menjadi *team leader* dalam proses penilaian IKK. Tim koordinasi yang ada di Bappeda mengkoordinir 33 Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Garut. Tim tersebut sudah memahami tugas dan fungsi selama proses penilaian IKK, karena tahun 2023 adalah tahun kedua dalam penilaian IKK. Dalam mengkoordinir PD, tim dari Bappeda mempunyai anggota dari masing-masing PD tersebut.

PD diharapkan menyokong proses penilaian IKK melalui *evidence* yang dimiliki oleh PD yang menghasilkan kebijakan.

Untuk tim yang menyokong peran Bappeda belum tentu memahami tugas dan fungsinya dalam proses penilaian IKK. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa PD yang kesulitan untuk mengumpulkan *evidence* dalam proses penilaian IKK. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman tentang pentingnya IKK belum tersosialisasi dengan baik ke PD yang ada di Kabupaten Garut sehingga tingkat kepedulian dan pemahaman untuk melakukan pengisian dan melengkapi dokumen sebagai *evidence* masih mengalami kesulitan.

2. Realisasi nilai IKK Kabupaten Garut pada tahun 2021 adalah 42,96. Target yang ingin dicapai untuk penilaian IKK Kabupaten Garut pada tahun 2023 adalah 80,00, namun hanya tercapai di angka 68,80, dengan nilai seperti itu mencerminkan kualitas kebijakan di Kabupaten Garut sudah baik namun bila dibanding dengan *score* ideal 100 artinya masih sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kesenjangan (*gap*) target dan realisasi hasil IKK Pemerintah Kabupaten Garut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.
Gap Nilai IKK Kabupaten Garut



Sumber: KemenPAN&RB, 2024 (diolah)

Dari Gambar 2 tersebut, walau tren nilai IKK meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2023, namun masih terlihat adanya *gap* sebesar 11,20 antara target dan realisasi nilai IKK pada tahun 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kendala yang dihadapi Bappeda dan PD yang menyokongnya dalam mencapai nilai IKK yang ditargetkan. Kendala tersebut dapat diketahui melalui cara penilaian/pengukuran mandiri IKK oleh tim penulis.

Untuk *sample* kebijakan yang kami ukur yaitu Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, dan hasil IKK bernilai 15,05 (olahan tim penulis). Berarti ada beberapa indikator *evidence* yang masih mempunyai kekurangan.

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan bersama tim terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 terdapat catatan terhadap penguatan aspek Agenda Setting Kebijakan, aspek Formulasi Kebijakan, aspek Implementasi Kebijakan, dan aspek Evaluasi Kebijakan.

Pada aspek Agenda Setting Kebijakan, hasil verifikasi mendapatkan nilai 5,56. Pada tahapan ini, belum adanya penyampaian dokumen yang menginformasikan bahwa agenda kebijakan mendesak, sehingga diperlukan solusi berupa penyusunan kebijakan untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu.

Pada aspek Formulasi Kebijakan, hasil verifikasi mendapatkan nilai 2,48. Pada tahap formulasi, kebijakan membutuhkan kajian dan analisis yang memadai. Hal ini didukung dengan bukti dan dokumentasi dalam penyusunan kebijakan. Formulasi kebijakan yang ditetapkan belum menawarkan alternatif solusi sehingga akan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Pada aspek Implementasi Kebijakan, hasil verifikasi mendapatkan nilai 4,27. Pada implementasinya, kebijakan belum didukung dengan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan. Monitoring dalam implementasi kebijakan belum dilakukan, padahal hal tersebut sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan.



Pada aspek Evaluasi Kebijakan, hasil verifikasi mendapatkan nilai 2,75. Terdapat *gap* dalam penilaian ini karena belum adanya lampiran *evidence* yang sesuai pada setiap indikator yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi dan respon dari *stakeholder* dalam implementasi kebijakan ini. Sehingga ke depannya dapat dihasilkan kebijakan yang lebih berkualitas.

3. Masalah pengelolaan target waktu pengumpulan *evidence* dalam proses penilaian IKK nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Melalui hasil wawancara, diperoleh fakta bahwa nilai IKK yang rendah, salah satunya disebabkan karena pengumpulan (*upload*) *evidence* terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan oleh penilai kualitas kebijakan (LAN).

C. Rekomendasi Kebijakan

Dari deskripsi masalah yang telah disebutkan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan tim koordinator penyusunan IKK dalam hal ini Bappeda, dengan memberikan pemahaman terhadap semua perangkat daerah terkait pentingnya peran serta dan komitmen selama proses penilaian IKK. Tim koordinator (Bappeda) dapat memberikan *job description* yang jelas terhadap PD yang secara langsung dilibatkan dalam proses penilaian IKK.
2. Target nilai IKK Kabupaten Garut pada tahun 2023 adalah 80,00, namun realisasinya hanya tercapai 86%. Untuk penilaian IKK tahun 2025 yang akan datang, Kabupaten Garut mempunyai target nilai IKK sebesar 73,20. Untuk mencapai realisasi 100% bahkan lebih pada tahun 2025 tersebut, tentu saja diperlukan perencanaan mulai dari sekarang. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai strategi peningkatan nilai IKK Kabupaten Garut pada tahun 2025, diantaranya pelaksanaan bimbingan teknis mengenai materi IKK, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian IKK pada tahun 2023, dan menyusun

kebijakan yang lebih baik ke depannya apabila sudah memahami indikator-indikator suatu kebijakan tersebut sehingga disebut berkualitas.

Membangun kolaborasi dengan lembaga (instansi Pemerintah) yang berkompeten bisa menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan program pengembangan dan peningkatan kualitas kebijakan. Kolaborasi yang berkesinambungan dan tersistematis akan menjadi kunci melakukan perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) yang akan menjadi pemicu dan pemacu perbaikan/peningkatan indikator-indikator reformasi birokrasi yang lainnya.

3. Adanya intervensi dari pimpinan dalam mewujudkan nilai IKK yang sangat baik tentu menjadi faktor penting dalam proses penilaian IKK ini. Sehingga diperlukan adanya Surat Penugasan yang mempunyai legalitas yang dapat mendorong tim penilaian IKK mempunyai komitmen yang tinggi dalam menuntaskan proses penilaian IKK tepat pada waktunya.

D. Strategi Implementasi

1. Bappeda menyelenggarakan kegiatan mengenai proses penilaian IKK, mulai dari: a) Koordinasi dengan semua PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut melalui *Forum Group Discussion (FGD)*; b) Penjelasan poin-poin yang akan diukur pada penilaian IKK; c) Memberikan penjelasan mengenai *evidence* yang tepat dan lengkap dalam pengisian dokumen yang harus dilampirkan dalam proses penilaian IKK.

2. Pelaksanaan bimbingan teknis mengenai penyusunan IKK dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dapat membantu PD *refresh* kembali proses penyusunan IKK. Lebih lanjut, dapat dilakukan kegiatan pendampingan penyusunan IKK atau pengembangan program peningkatan kualitas kebijakan. Pendampingan daerah dilakukan oleh tim yang berkompeten, selama proses penilaian IKK Nasional atau ketika akan menghadapi proses penilaian IKK di periode selanjutnya.
3. Disusunnya Surat Keputusan Bupati untuk memberikan kejelasan tugas dan fungsi setiap PD dalam mendukung proses penilaian IKK. Tujuannya untuk membangun komitmen bersama di antara semua PD untuk bertanggung jawab menjadi pengungkit nilai IKK, yang merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam RB.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Nomor B/266/RB.06/2022

Holidin, Defny. 2013. Reformasi Birokrasi dalam Praktik. Jakarta: Kemen PAN & RB

<https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

LKE Kemen PAN & RB Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Nota Dinas Laporan Hasil Kajian Bersama (*Joint Research*) Policy Brief LAN dan Bagian Organisasi tentang Strategi Peningkatan IKK untuk Peningkatan Nilai RB Kabupaten Garut

Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2023





POLICY BRIEF

Melejitkan IKK Garut, Intip Strateginya?



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSLATBANG PKASN

Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat



Untuk informasi lebih lanjut :

0857-2353-2423



www.bandung.lan.go.id



[puslatbangpkasn_lan](https://www.instagram.com/puslatbangpkasn_lan)



[puslatbang PKASN LAN](https://www.facebook.com/puslatbangpkasn.lan)